

# KOMUNIKASI POLITIK di Era **AI**

Syamsul Arif Billah, S.Sos., M.I.Kom.  
Adi Junaidi, S.I.Kom., M.I.Kom.

# **KOMUNIKASI POLITIK DI ERA AI**

# KOMUNIKASI POLITIK DI ERA AI

Syamsul Arif Billah  
Adi Junadi



# KOMUNIKASI POLITIK DI ERA AI

Penulis:  
Syamsul Arif Billah  
Adi Junadi

Editor:  
Aqiq Zainul Kirom  
Aditya Ghafar Ruharto

Layouter :  
Tim Kreatif PRCI

Cover:  
Rusli

Cetakan Pertama : Juli 2024

Hak Cipta 2024, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

**Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia**  
**ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT**  
Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151  
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website : [www.rcipress.rcipublisher.org](http://www.rcipress.rcipublisher.org)  
E-mail : [rumahcemerlangindonesia@gmail.com](mailto:rumahcemerlangindonesia@gmail.com)

Copyright © 2024 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia  
All Right Reserved

- Cet. I – : Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2024  
; 15,5 x 23 cm  
ISBN : 978-623-448-939-2-

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan  
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang  
**Hak Cipta Pasal 72**

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta  
Pasal 72

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya, buku referensi "Komunikasi Politik di Era AI" ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai salah satu upaya untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman yang komprehensif mengenai komunikasi politik di era kecerdasan buatan (AI).

Buku ini hadir untuk memberikan wawasan dan pengetahuan yang diperlukan bagi mahasiswa agar dapat memahami dan mengaplikasikan konsep-konsep komunikasi politik dalam konteks perkembangan teknologi AI.

Buku ini disusun dengan susunan bab yang sistematis dan terstruktur, dimulai dari paradigma baru dalam komunikasi politik di era kecerdasan buatan, platform digital dan komunikasi politik, pemilih di era AI dengan fokus pada perilaku, preferensi, dan pola konsumsi, hingga politik identitas dan komunikasi berbasis kelompok. Selain itu, buku ini juga membahas komunikasi pemerintah dan keterbukaan informasi, komunikasi pemilu dan proses demokrasi, serta komunikasi pemerintahan dan pembuat kebijakan. Tidak ketinggalan, isu lingkungan dalam komunikasi politik, komunikasi politik di negara berkembang, serta etika dan regulasi komunikasi politik di era AI juga turut diulas.

Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, dan praktisi komunikasi politik dalam memahami dinamika komunikasi politik di era AI. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ilmu komunikasi politik di Indonesia.

Majalengka, Juli 2024

Penulis

# DAFTAR ISI

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| KATA PENGANTAR                                                        | I  |
| DAFTAR ISI                                                            | II |
| BAB 1 PARADIGMA BARU KOMUNIKASI POLITIK DI ERA KECERDASAN BUATAN      | 1  |
| 1.1 Pengertian Transformasi Komunikasi Politik dalam Lanskap Digital  | 1  |
| 1.2 Peran Kecerdasan Buatan dalam Komunikasi Politik                  | 4  |
| 1.3 Sejarah Dampak AI terhadap Proses Politik dan Pembuatan Kebijakan | 6  |
| BAB 2 PLATFORM DIGITAL DAN KOMUNIKASI POLITIK                         | 9  |
| 2.1 Media Sosial sebagai Ruang Publik Digital                         | 9  |
| 2.2 Algoritma dan Personalisasi Konten Politik                        | 10 |
| 2.3 Tantangan Misinformasi dan Disinformasi di Media Sosial           | 12 |
| BAB 3 PEMILIH DI ERA AI : PERILAKU, PREFERENSI DAN POLA KONSUMSI      | 14 |
| 3.1 Profil Pemilih Digital: Karakteristik dan Kecenderungan           | 14 |
| 3.2 Analisis Data Pemilih dengan Kecerdasan Buatan                    | 16 |
| 3.3 Implikasi AI terhadap Komunikasi dan Strategi Kampanye            | 18 |
| BAB 4 POLITIK IDENTITAS DAN KOMUNIKASI BERBASIS KELOMPOK              | 20 |
| 4.1 Konstruksi Identitas Politik di Ruang Digital                     | 20 |
| 4.2. Mobilisasi Berbasis Komunitas dengan Dukungan AI                 | 22 |
| 4.3. Tantangan Polarisasi dan Radikalisasi Politik                    | 24 |
| BAB 5 KOMUNIKASI PEMERINTAH DAN KETERBUKAAN INFORMASI                 | 26 |
| 5.1 E-Governance dan Layanan Publik Berbasis AI                       | 26 |
| 5.2 Keterbukaan Data dan Transparansi Pemerintah                      | 28 |
| 5.3 Pemanfaatan AI untuk Keterlibatan Warga                           | 29 |

|                                                                  |        |
|------------------------------------------------------------------|--------|
| BAB 6 KOMUNIKASI PEMILU DAN PROSES DEMOKRASI                     | 32     |
| 6.1 Kampanye Politik di Era Digital dan AI                       | 32     |
| 6.2 Analisis Sentimen dan Prediksi Hasil Pemilu                  | 34     |
| 6.3 Isu Etika dan Regulasi Komunikasi Pemilu                     | 36     |
| <br>BAB 7 KOMUNIKASI PEMERINTAHAN DAN PEMBUAT<br>KEBIJAKAN       | <br>38 |
| 7.1 Peran AI dalam Analisis Kebijakan<br>dan Perumusan Kebijakan | 38     |
| 7.2 Komunikasi Kebijakan dan Partisipasi Publik                  | 40     |
| 7.3 Tantangan Akuntabilitas dan Pengawasan Kebijakan             | 42     |
| <br>BAB 8 KOMUNIKASI POLITIK DAN ISU LINGKUNGAN                  | <br>44 |
| 8.1 Pemanfaatan AI untuk Komunikasi Keberlanjutan                | 44     |
| 8.2 Mobilisasi Gerakan Lingkungan Berbasis Digital               | 46     |
| 8.3 Tantangan Disinformasi Terkait Isu Lingkungan                | 47     |
| <br>BAB 9 KOMUNIKASI POLITIK DI NEGARA BERKEMBANG                | <br>49 |
| 9.1 Peluang dan Tantangan Penggunaan AI di Negara<br>Berkembang  | 49     |
| 9.2 Inklusi Digital dan Keadilan Akses Informasi Politik         | 51     |
| 9.3 Dampak AI terhadap Stabilitas Politik dan Demokratisasi      | 53     |
| <br>BAB 10 ETIKA DAN REGULASI KOMUNIKASI POLITIK<br>DI ERA AI    | <br>56 |
| 10.1 Kerangka Etika Komunikasi Politik Berbasis AI               | 56     |
| 10.2 Tantangan Privasi, Keamanan, dan Hak Cipta                  | 58     |
| 10.3 Kebijakan dan Regulasi Komunikasi Politik Digital           | 59     |
| DAFTAR PUSTAKA                                                   | 62     |
| BIOGRAFI PENULIS                                                 | 72     |



# BAB 1

## PARADIGMA BARU KOMUNIKASI POLITIK DI ERA KECERDASAN BUATAN



Gambar 1. Ilustrasi Komunikasi Politik di Era AI

### 1.1 Pengertian Transformasi Komunikasi Politik dalam Lanskap Digital

Komunikasi politik telah mengalami transformasi signifikan dalam lanskap digital yang terus berkembang. Kemunculan teknologi baru, seperti media sosial, big data, dan kecerdasan buatan (AI), telah mengubah cara informasi disebarkan, opini dibentuk, dan kampanye politik dijalankan. Transformasi ini telah menggeser paradigma komunikasi politik tradisional dan membawa tantangan serta peluang baru bagi semua pemangku kepentingan.

Menurut Flew (2018), revolusi digital telah mengubah cara kita berkomunikasi, berinteraksi, dan berpartisipasi dalam proses politik. Ia menyoroti bahwa media sosial dan platform digital telah menciptakan ruang publik virtual yang memungkinkan warga negara untuk terlibat dalam diskusi politik secara lebih langsung dan partisipatif.

Transformasi komunikasi politik dalam lanskap digital juga ditandai dengan pergeseran dari model komunikasi top-down menuju model komunikasi yang lebih desentralisasi dan interaktif. Sebagaimana dijelaskan oleh (Lilleker, 2014), media sosial telah memungkinkan aktor politik untuk terlibat secara langsung dengan pemilih, sementara warga negara juga dapat

menyuarakan pendapat dan mempengaruhi agenda politik secara lebih efektif.

Salah satu aspek penting dari transformasi ini adalah pergeseran kekuatan dari media tradisional ke media digital. Menurut (Chadwick, 2017), media digital telah menjadi sumber informasi utama bagi banyak orang, sementara media tradisional seperti televisi dan surat kabar kehilangan pengaruh dan kepercayaan publik. Hal ini telah mengubah dinamika komunikasi politik dan memaksa aktor politik untuk beradaptasi dengan lingkungan media yang baru.

Di sisi lain, transformasi komunikasi politik dalam lanskap digital juga telah memunculkan tantangan baru seperti penyebaran misinformasi dan disinformasi. Penelitian oleh (Bradshaw & Howard, 2019a) mengungkapkan bahwa kampanye disinformasi terkoordinasi telah menjadi ancaman serius bagi proses demokrasi di banyak negara, dengan kemampuan untuk menyebarkan informasi palsu dan mempengaruhi opini publik secara masif.

Selain itu, penggunaan algoritma dan personalisasi konten oleh platform media sosial telah menciptakan fenomena filter gelembung (*filter bubble*) dan kamar gema (*echo chambers*), di mana individu hanya terpapar dengan informasi yang sesuai dengan preferensi dan keyakinan mereka. Keadaan ini dapat memperkuat polarisasi politik dan membatasi paparan terhadap perspektif yang beragam, seperti yang disoroti oleh (Pariser, 2011a) dalam konsep filter gelembung.

Dalam konteks ini, peran kecerdasan buatan (AI) menjadi semakin penting dalam transformasi komunikasi politik di era digital. AI dapat digunakan untuk menganalisis data besar, mengidentifikasi tren, dan membantu pengambilan keputusan yang lebih baik dalam strategi komunikasi politik. Namun, penggunaan AI juga menghadirkan tantangan seperti bias algoritma, privasi data, dan risiko manipulasi.

Menurut penelitian (Diakopoulos, 2016a), algoritma AI yang digunakan dalam pengambilan keputusan politik seringkali kurang transparan dan sulit untuk diaudit, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang bias dan ketidakadilan. Ia menekankan pentingnya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan AI dalam komunikasi politik.

Transformasi komunikasi politik dalam lanskap digital juga telah mempengaruhi peran dan tanggung jawab aktor-aktor

kunci seperti politisi, media, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi. Sebagaimana dijelaskan oleh (Bennett & Pfetsch, 2018), aktor-aktor ini perlu beradaptasi dengan lingkungan komunikasi yang baru dan mengembangkan strategi serta keterampilan baru untuk dapat terlibat secara efektif dalam proses komunikasi politik di era digital.

Bagi politisi dan partai politik, transformasi ini berarti perlu meningkatkan kehadiran digital, mengembangkan strategi media sosial yang efektif, dan memanfaatkan data serta analitik untuk memahami preferensi dan perilaku pemilih. Namun, di saat yang sama, mereka juga harus menjaga kredibilitas, transparansi, dan menghindari praktik manipulatif atau menyesatkan.

Media tradisional, seperti surat kabar dan televisi, dihadapkan pada tantangan untuk beradaptasi dengan lingkungan digital yang terus berkembang. Mereka perlu menemukan model bisnis yang berkelanjutan, meningkatkan kehadiran online, dan memanfaatkan teknologi baru seperti multimedia interaktif dan jurnalisme data untuk menarik dan mempertahankan audiens.

Organisasi masyarakat sipil dan akademisi memiliki peran penting dalam memastikan bahwa transformasi komunikasi politik dalam lanskap digital berjalan selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Mereka perlu mempromosikan literasi media digital, mengawasi penggunaan AI secara bertanggung jawab, dan memastikan bahwa suara masyarakat terwakili dalam proses komunikasi politik.

(Rauchfleisch & Schäfer, 2015a) Secara keseluruhan, transformasi komunikasi politik dalam lanskap digital telah membawa perubahan mendasar dalam cara informasi disebarkan, opini dibentuk, dan proses politik berlangsung. Meskipun transformasi ini membuka peluang baru untuk partisipasi warga negara dan keterlibatan yang lebih besar, namun juga menghadirkan tantangan seperti misinformasi, polarisasi, dan bias algoritma. Diperlukan upaya kolektif dari semua pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa transformasi ini berjalan selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

## **1.2 Peran Kecerdasan Buatan dalam Komunikasi Politik**

Kecerdasan Buatan (AI) telah menjadi salah satu teknologi yang paling menjanjikan dan disruptif dalam berbagai bidang, termasuk komunikasi politik. Dengan kemampuannya untuk memproses data besar, mengidentifikasi pola, dan mengambil keputusan secara otomatis, AI berpotensi untuk mengubah cara informasi disebarkan, opini dibentuk, dan strategi komunikasi politik dirancang.

Salah satu peran utama AI dalam komunikasi politik adalah kemampuannya untuk menganalisis data besar dan mengidentifikasi tren serta sentimen publik secara real-time. Menurut (Stieglitz et al., 2018), AI dapat digunakan untuk memantau percakapan di media sosial, menganalisis konten, dan mengidentifikasi topik yang menjadi perhatian masyarakat. Informasi ini dapat dimanfaatkan oleh aktor politik untuk merumuskan strategi komunikasi yang lebih efektif dan merespons kebutuhan serta preferensi pemilih secara lebih tepat.

Di sisi lain, AI juga dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dalam komunikasi politik. Dengan kemampuannya untuk menganalisis data historis dan mengidentifikasi pola, AI dapat memberikan wawasan berharga tentang strategi komunikasi yang berhasil di masa lalu dan memprediksi bagaimana strategi tertentu akan diterima oleh publik. Ini dapat membantu aktor politik untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya dan memastikan bahwa pesan mereka mencapai audiens yang tepat.

Namun, penggunaan AI dalam komunikasi politik juga menghadirkan tantangan dan risiko yang harus diatasi. Salah satu kekhawatiran utama adalah potensi bias algoritma, di mana sistem AI dapat menghasilkan keputusan atau rekomendasi yang bias karena data pelatihan atau asumsi yang mendasarinya. Sebagaimana dijelaskan oleh (Buolamwini & Gebru, 2018), bias algoritma dapat memperkuat ketidakadilan dan diskriminasi dalam konteks komunikasi politik, misalnya dengan menargetkan konten atau pesan tertentu secara tidak proporsional terhadap kelompok tertentu.

Selain itu, penggunaan AI dalam komunikasi politik juga menghadapi tantangan terkait privasi data dan keamanan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Hitaj et al., 2017), sistem AI yang digunakan untuk menganalisis data pengguna media sosial dapat menyebabkan risiko pelanggaran privasi jika tidak

dikelola dengan baik. Ini menekankan pentingnya mengembangkan kerangka kerja regulasi dan praktik terbaik untuk memastikan penggunaan AI dalam komunikasi politik dilakukan dengan cara yang aman dan bertanggung jawab.

Dalam konteks komunikasi politik, AI juga dapat dimanfaatkan untuk memproduksi konten personalisasi secara otomatis, seperti pesan kampanye yang disesuaikan dengan preferensi dan karakteristik individu. Meskipun ini dapat meningkatkan efektivitas komunikasi, namun juga menghadirkan risiko manipulasi dan penyebaran informasi menyesatkan atau berbahaya.

Menurut (Tufekci, 2018a), penggunaan AI untuk memproduksi konten personalisasi secara masif dapat memperkuat polarisasi politik dan menciptakan filter gelembung (filter bubble), di mana individu hanya terpapar dengan informasi yang sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.

Untuk mengatasi tantangan ini, penting bagi para pemangku kepentingan dalam komunikasi politik untuk mengembangkan kerangka kerja etika dan tata kelola yang kuat untuk penggunaan AI. Hal ini meliputi upaya untuk meningkatkan transparansi algoritma, memastikan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan berbasis AI, dan melibatkan masyarakat sipil serta akademisi dalam pengembangan dan implementasi sistem AI.

Selain itu, peran AI dalam komunikasi politik juga perlu dipahami dalam konteks yang lebih luas dari transformasi digital dan pergeseran kekuatan dalam ruang publik. Sebagaimana dijelaskan oleh, revolusi digital telah menciptakan ruang publik virtual yang lebih desentralisasi, di mana warga negara dapat terlibat secara langsung dalam proses komunikasi politik dan mempengaruhi agenda politik.

Dalam konteks ini, AI berpotensi untuk memperkuat partisipasi warga negara dan keterlibatan publik dalam komunikasi politik. Misalnya, sistem AI dapat digunakan untuk memfasilitasi forum diskusi online yang lebih efektif dan inklusif, atau untuk menganalisis masukan dan pendapat publik secara lebih sistematis dalam proses pembuatan kebijakan.

Namun, di sisi lain, AI juga dapat menjadi alat untuk kontrol dan pengawasan yang berlebihan oleh pemerintah atau aktor tertentu, sehingga membatasi kebebasan berekspresi dan

menghambat partisipasi warga negara yang sehat dalam komunikasi politik.

Oleh karena itu, penting bagi semua pemangku kepentingan untuk terlibat dalam diskusi dan pengembangan kerangka kerja yang memastikan bahwa penggunaan AI dalam komunikasi politik berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Secara keseluruhan, peran AI dalam komunikasi politik terus berkembang dan berpotensi untuk mengubah lanskap komunikasi politik secara signifikan. Meskipun AI membawa peluang baru untuk analisis data yang lebih baik, personalisasi konten, dan pengambilan keputusan yang lebih efektif, namun juga menghadirkan tantangan seperti bias algoritma, privasi data, dan risiko manipulasi. Diperlukan upaya kolektif dari semua pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa penggunaan AI dalam komunikasi politik dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab, adil, dan selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi.

### **1.3 Sejarah Dampak AI terhadap Proses Politik dan Pembuatan Kebijakan**

Kecerdasan Buatan (AI) telah menjadi salah satu teknologi yang paling menjanjikan dan disruptif dalam berbagai bidang, termasuk dalam proses politik dan pembuatan kebijakan. Meskipun masih berada dalam tahap awal penerapannya, AI telah mulai memberikan dampak signifikan terhadap cara informasi disebarkan, opini dibentuk, dan keputusan politik diambil.

Salah satu dampak awal AI dalam proses politik adalah kemampuannya untuk menganalisis data besar dan mengidentifikasi tren serta sentimen publik secara real-time. Hal ini telah dimanfaatkan oleh banyak aktor politik dalam kampanye pemilihan umum, seperti yang terlihat dalam kampanye presiden Amerika Serikat pada tahun 2012 dan 2016. Sebagaimana dijelaskan oleh Tufekci (2014), penggunaan analitik data dan algoritma AI memungkinkan tim kampanye untuk menargetkan pesan dan strategi komunikasi secara lebih efektif kepada kelompok pemilih tertentu.

Namun, penggunaan AI dalam kampanye politik juga mengundang kontroversi dan kekhawatiran tentang potensi manipulasi dan penyalahgunaan data. Salah satu contoh yang

paling menonjol adalah skandal Cambridge Analytica pada tahun 2018, di mana perusahaan tersebut diduga menggunakan data pribadi pengguna media sosial untuk mempengaruhi opini dan perilaku pemilih dalam pemilihan presiden AS 2016.

Selain itu, AI juga telah mulai digunakan dalam proses pembuatan kebijakan oleh pemerintah dan lembaga negara. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Mehr, 2017b), sistem AI telah dimanfaatkan untuk menganalisis data besar dan memberikan wawasan berharga dalam perumusan kebijakan di bidang seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi.

Salah satu contoh penggunaan AI dalam pembuatan kebijakan adalah sistem prediktif policing atau predictive policing. Teknologi ini menggunakan algoritma AI untuk menganalisis data historis kejahatan dan mengidentifikasi pola serta area berisiko tinggi, dengan tujuan untuk mengalokasikan sumber daya kepolisian secara lebih efektif. Meskipun memiliki potensi untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi, predictive policing juga menghadapi kritik karena risiko bias algoritma dan diskriminasi terhadap kelompok tertentu.

Dalam konteks global, beberapa negara telah mulai mengeksplorasi penggunaan AI dalam proses politik dan pembuatan kebijakan. Di Inggris, Pusat Kebijakan Pemerintah (*Centre for Government Policy*) telah mengembangkan sistem AI untuk membantu dalam analisis kebijakan dan pengambilan keputusan. Sementara itu, di Belanda, pemerintah telah meluncurkan proyek penelitian untuk mengeksplorasi potensi penggunaan AI dalam pelayanan publik dan administrasi pemerintahan.

Namun, penggunaan AI dalam proses politik dan pembuatan kebijakan juga menghadapi tantangan signifikan, seperti kekhawatiran tentang transparansi, akuntabilitas, dan bias algoritma. Sebagaimana dijelaskan oleh Diakopoulos (2016), algoritma AI yang digunakan dalam pengambilan keputusan politik seringkali kurang transparan dan sulit untuk diaudit, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang bias dan ketidakadilan.

Untuk mengatasi tantangan ini, banyak pakar dan organisasi telah menekankan pentingnya mengembangkan kerangka kerja etika dan tata kelola yang kuat untuk penggunaan AI dalam proses politik dan pembuatan kebijakan. Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan privasi data

harus menjadi landasan dalam pengembangan dan implementasi sistem AI yang bertanggung jawab.

Selain itu, peran masyarakat sipil dan akademisi juga menjadi sangat penting dalam mengawasi penggunaan AI dalam proses politik dan pembuatan kebijakan. Mereka dapat memberikan masukan kritis, memastikan bahwa suara masyarakat terwakili, dan mendorong praktik terbaik dalam penggunaan AI secara bertanggung jawab.

Secara keseluruhan, sejarah dampak AI terhadap proses politik dan pembuatan kebijakan masih relatif baru, namun telah menunjukkan potensi yang besar serta tantangan signifikan. Meskipun AI berpotensi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi warga negara, namun juga menghadirkan risiko seperti manipulasi, bias algoritma, dan pelanggaran privasi data. Oleh karena itu, penting bagi semua pemangku kepentingan untuk terlibat dalam diskusi dan pengembangan kerangka kerja yang memastikan bahwa penggunaan AI dalam proses politik dan pembuatan kebijakan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

## BAB 2

### PLATFORM DIGITAL DAN KOMUNIKASI POLITIK



Gambar 2. Ilustrasi Platform Digital

#### 2.1 Media Sosial sebagai Ruang Publik Digital

Kemunculan media sosial telah menciptakan ruang publik digital yang baru, di mana warga dapat berpartisipasi dalam diskusi politik, menyebarkan pandangan mereka, dan terlibat dalam proses demokratis. Media sosial telah menjadi platform penting untuk komunikasi politik di era digital ini, mengubah cara penyampaian informasi dan pembentukan opini.

Menurut Nasrullah (Nasrullah, 2015), media sosial telah menjadi ruang publik kontemporer di mana individu dapat bertukar informasi, berinteraksi, dan membangun jaringan sosial secara virtual. Ia menyatakan bahwa media sosial telah menciptakan ruang publik digital yang memungkinkan warga untuk berpartisipasi dalam diskusi publik dan mempengaruhi opini publik.

Sebuah studi oleh Juditha (Juditha, 2015) mengeksplorasi peran media sosial dalam konteks politik di Indonesia. Ia menemukan bahwa media sosial telah menjadi alat penting bagi kandidat politik untuk menyampaikan pesan mereka dan melibatkan pemilih. Namun, penelitian tersebut juga menekankan pentingnya literasi media untuk memastikan bahwa warga dapat mengakses informasi yang akurat dan mengambil keputusan yang tepat.

Dalam konteks global, penelitian Dahlgren (Dahlgren, 2018) menyoroti bagaimana internet dan media digital telah menciptakan ruang publik baru yang memungkinkan warga untuk terlibat dalam diskusi politik secara lebih terbuka dan demokratis. Namun, ia juga mengakui tantangan seperti polarisasi, misinformasi, dan dominasi kelompok tertentu dalam ruang publik digital.

Rauchfleisch dan Schäfer (Rauchfleisch & Schäfer, 2015b) mempelajari peran media sosial dalam komunikasi politik selama pemilihan umum di Jerman. Mereka menemukan bahwa media sosial memungkinkan kandidat untuk terlibat langsung dengan pemilih, tetapi juga menciptakan tantangan baru seperti penyebaran informasi palsu dan serangan online.

Penelitian oleh Papacharissi (Papacharissi, 2002) mengeksplorasi konsep "ruang publik virtual" yang diciptakan oleh media baru seperti internet dan media sosial. Ia menyoroti potensi ruang publik virtual untuk memfasilitasi diskusi politik yang lebih inklusif dan partisipatif, tetapi juga menekankan pentingnya memastikan akses yang setara dan mencegah dominasi oleh kelompok tertentu.

Meskipun media sosial telah menciptakan ruang publik digital yang baru, tantangan seperti polarisasi, misinformasi, dan dominasi kelompok tertentu masih harus diatasi untuk memastikan bahwa ruang publik digital ini benar-benar mendukung komunikasi politik yang sehat dan demokratis.

## **2.2 Algoritma dan Personalisasi Konten Politik**

Algoritma dan personalisasi konten telah menjadi fitur penting dalam lanskap digital, termasuk dalam konteks komunikasi politik. Platform media sosial dan mesin pencari menggunakan algoritma untuk menyajikan konten yang relevan dan disesuaikan dengan preferensi dan perilaku pengguna. Meskipun ini dapat meningkatkan pengalaman pengguna, namun juga mengundang kekhawatiran tentang polarisasi, filter gelembung, dan dominasi kelompok tertentu dalam diskusi politik.

Menurut Islami (Islami, 2020), algoritma media sosial memainkan peran penting dalam membentuk pengalaman pengguna dan mengatur aliran informasi yang mereka terima. Ia menyoroti bahwa algoritma ini dapat menyebabkan personalisasi konten yang terlalu ekstrem, di mana pengguna hanya terpapar

dengan informasi yang sesuai dengan preferensi mereka, sehingga menciptakan filter gelembung dan memperkuat bias kognitif.

Penelitian oleh Bozdag dan van den Hoven (Bozdag & van den Hoven, 2015) menganalisis dampak algoritma personalisasi terhadap demokrasi dan partisipasi politik. Mereka menyimpulkan bahwa personalisasi konten dapat membatasi eksposur pengguna terhadap beragam perspektif dan ide baru, sehingga membatasi diskusi politik yang terbuka dan inklusif.

Dalam konteks Indonesia, penelitian oleh Utami (Utami, 2019) mengeksplorasi peran algoritma media sosial dalam menyebarkan informasi politik selama pemilihan umum. Ia menemukan bahwa algoritma cenderung memprioritaskan konten kontroversi dan sensasional, yang dapat menyebabkan polarisasi dan menyebarkan informasi palsu.

Studi oleh Flaxman et al. (Flaxman et al., 2016) pada pemilihan presiden AS 2016 menemukan bahwa personalisasi konten berbasis algoritma di media sosial dapat menyebabkan filter gelembung dan polarisasi politik yang lebih besar. Mereka menyimpulkan bahwa individu cenderung terpapar dengan konten yang sesuai dengan pandangan politik mereka, sehingga memperkuat bias kognitif dan membatasi eksposur terhadap perspektif yang berbeda.

Penelitian oleh Pariser (Pariser, 2011) memperkenalkan konsep "filter gelembung" yang diciptakan oleh algoritma personalisasi. Ia menyoroti bahwa filter gelembung dapat menyebabkan pengguna hanya terpapar dengan informasi yang sesuai dengan preferensi dan keyakinan mereka, sehingga membatasi akses mereka terhadap perspektif yang berbeda dan memperburuk polarisasi.

Meskipun personalisasi konten berbasis algoritma dapat meningkatkan pengalaman pengguna, namun juga menghadirkan tantangan dalam konteks komunikasi politik, seperti filter gelembung, polarisasi, dan kurangnya eksposur terhadap beragam perspektif. Oleh karena itu, penting untuk memahami dampak algoritma personalisasi dan mencari solusi untuk menjaga lingkungan informasi yang terbuka dan inklusif.

## **2.3 Tantangan Misinformasi dan Disinformasi di Media Sosial**

Penyebaran misinformasi dan disinformasi di media sosial telah menjadi tantangan serius dalam komunikasi politik di era digital. Platform media sosial yang memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan luas, serta personalisasi konten berbasis algoritma, telah menciptakan lingkungan yang rentan terhadap penyebaran informasi palsu dan menyesatkan.

Menurut Juditha (Juditha, 2015), media sosial telah menjadi sarana penyebaran informasi palsu dan hoaks di Indonesia, terutama selama periode pemilihan umum. Ia menyoroti bahwa misinformasi dan disinformasi dapat mempengaruhi persepsi dan opini publik, serta merusak proses demokrasi.

Penelitian oleh Shu et al. (Shu et al., 2017) menganalisis penyebaran misinformasi di media sosial dan menemukan bahwa konten yang mengandung informasi palsu cenderung lebih menarik, provokatif, dan cepat menyebar daripada konten faktual. Mereka menyoroti pentingnya meningkatkan literasi media dan mengembangkan metode deteksi misinformasi yang efektif.

Studi oleh Vosoughi et al. (Vosoughi et al., 2018) pada Twitter menemukan bahwa informasi palsu menyebar lebih cepat daripada informasi faktual, dan memiliki potensi untuk mencapai lebih banyak orang. Mereka menyimpulkan bahwa misinformasi telah menjadi tantangan serius bagi komunikasi politik di era digital.

Dalam konteks global, penelitian oleh Persily (Persily, 2017) mengeksplorasi dampak misinformasi terhadap pemilihan umum di Amerika Serikat. Ia menyoroti bahwa kampanye disinformasi yang terkoordinasi dapat mempengaruhi opini publik dan memperburuk polarisasi politik.

Penelitian oleh Wardle dan Derakhshan (Wardle & Derakhshan, 2017) menjelaskan perbedaan antara misinformasi (informasi salah yang disebarkan tanpa niat jahat) dan disinformasi (informasi palsu yang disebarkan dengan niat menyesatkan). Mereka menekankan pentingnya meningkatkan literasi digital dan mengembangkan kebijakan untuk mengatasi tantangan ini.

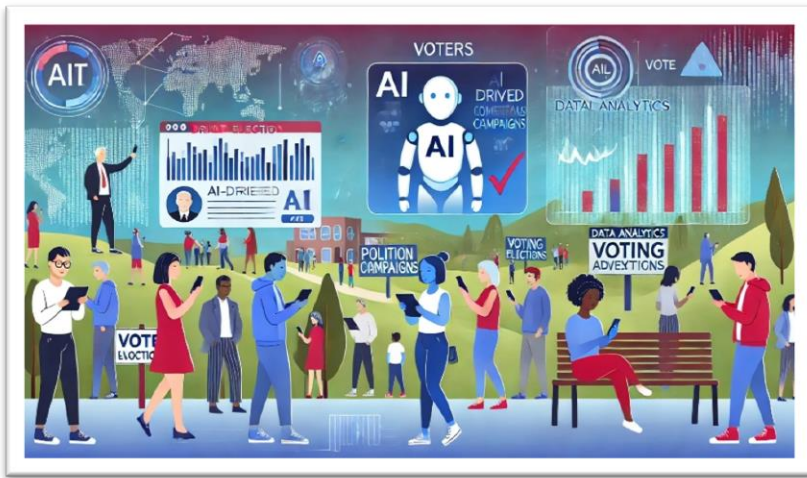
Upaya untuk mengatasi misinformasi dan disinformasi juga telah dilakukan di Indonesia. Menurut Lim (Lim, 2017), pemerintah Indonesia telah membentuk Satuan Tugas

Penanganan Informasi Hoaks untuk melawan penyebaran informasi palsu, terutama selama masa pemilihan umum.

Tantangan misinformasi dan disinformasi di media sosial telah menjadi masalah serius dalam komunikasi politik di era digital. Diperlukan upaya kolektif dari pemerintah, platform media sosial, organisasi media, akademisi, dan masyarakat untuk meningkatkan literasi digital, mengembangkan metode deteksi misinformasi yang efektif, dan mempromosikan penyebaran informasi yang akurat dan terpercaya.

### BAB 3

## PEMILIH DI ERA AI : PERILAKU, PREFERENSI DAN POLA KONSUMSI



Gambar 3. Ilustras Pemilih di Era AI : Perilaku, Preferensi dan Pola Konsumsi

### 3.1 Profil Pemilih Digital: Karakteristik dan Kecenderungan

Di era digital yang terus berkembang, profil pemilih telah mengalami transformasi yang signifikan. Kemunculan media sosial, big data, dan teknologi baru telah membentuk karakteristik dan kecenderungan baru dalam perilaku politik dan preferensi pemilih. Memahami profil pemilih digital menjadi sangat penting bagi aktor politik dan pemangku kepentingan dalam upaya merancang strategi komunikasi politik yang efektif.

Salah satu karakteristik utama pemilih digital adalah tingkat literasi media dan teknologi yang tinggi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Vraga et al., 2015), pemilih muda yang tumbuh di era digital cenderung memiliki keterampilan yang lebih baik dalam mengakses, mulai, dan menggunakan informasi dari berbagai sumber digital. Hal ini dapat mempengaruhi cara mereka mengonsumsi konten politik dan membentuk preferensi mereka.

Di sisi lain, pemilih digital juga cenderung lebih terpapar dengan beragam sumber informasi dan perspektif politik. serupa dijelaskan oleh (Quattrocchi et al., 2016), media sosial dan platform digital telah menciptakan informasi lingkungan yang lebih terfragmentasi, di mana individu dapat mengakses dan

terlibat dengan konten yang sesuai dengan keyakinan dan preferensi mereka. Ini dapat menyebabkan terbentuknya filter gelembung (filter bubble) dan kamar gema (echo chambers) yang memperkuat polarisasi politik.

Salah satu kecenderungan yang menarik di kalangan pemilih digital adalah meningkatnya preferensi terhadap konten politik yang lebih personalisasi dan interaktif. Penelitian yang dilakukan oleh (Bene, 2017) menemukan bahwa pemilih digital cenderung lebih tertarik pada konten yang disesuaikan dengan minat dan gaya hidup mereka, serta konten yang memungkinkan interaksi dan keterlibatan langsung dengan aktor politik.

Dalam konteks ini, peran algoritma dan personalisasi konten berbasis AI (Artificial Intelligence) menjadi semakin penting. Meskipun personalisasi konten dapat meningkatkan keterlibatan pemilih, namun juga menghadirkan risiko seperti penguatan bias kognitif dan polarisasi politik.

Karakteristik lain dari pemilih digital adalah kecenderungan untuk mengonsumsi informasi politik melalui saluran digital yang lebih beragam. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Fletcher & Nielsen, 2018), pemilih digital cenderung menggunakan kombinasi media tradisional, media sosial, dan platform digital untuk mengakses politik. Hal ini menciptakan tantangan baru bagi aktor politik dalam menyampaikan pesan yang konsisten dan efektif di berbagai saluran.

Selain itu, pemilih digital juga cenderung lebih aktif dalam menyuarakan pendapat dan berpartisipasi dalam diskusi politik secara online. Penelitian yang dilakukan oleh (Vaccari et al., 2015) menemukan bahwa pemilih digital lebih cenderung membagikan, menyukai, atau memuji konten politik di media sosial, serta terlibat dalam kampanye politik secara online.

Namun, penting untuk dicatat bahwa profil pemilih digital tidak seragam dan dapat bervariasi berdasarkan faktor-faktor seperti usia, pendidikan, status sosial-ekonomi, dan lokasi geografis. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami bagaimana karakteristik dan kecenderungan ini bervariasi di antara kelompok pemilih yang berbeda.

Secara keseluruhan, profil pemilih digital telah membentuk lanskap komunikasi politik yang baru, dengan karakteristik dan kecenderungan yang berbeda dari pemilih tradisional. Memahami profil ini menjadi kunci bagi aktor politik

dan pemangku kepentingan dalam merancang strategi komunikasi yang efektif dan memanfaatkan potensi teknologi digital secara optimal.

### **3.2 Analisis Data Pemilih dengan Kecerdasan Buatan**

Perkembangan teknologi Kecerdasan Buatan (AI) telah membuka peluang baru dalam analisis data pemilih dan pemahaman perilaku politik. Dengan kemampuannya untuk memproses data besar, mengidentifikasi pola, dan menghasilkan wawasan berharga, AI telah menjadi alat yang sangat bermanfaat bagi aktor politik dan pemangku kepentingan dalam komunikasi politik.

Salah satu aplikasi utama AI dalam analisis data pemilih adalah kemampuan untuk menganalisis data besar dari berbagai sumber, seperti media sosial, survei online, dan data demografi. serupa dijelaskan oleh (Stieglitz et al., 2018), AI dapat digunakan untuk mengkomunikasikan percakapan di media sosial, menganalisis sentimen, dan mengidentifikasi topik serta tren yang menjadi perhatian pemilih. Informasi ini dapat memberikan wawasan berharga bagi aktor politik dalam merancang strategi komunikasi yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan pemilih.

Di sisi lain, AI juga dapat digunakan untuk melakukan analisis prediktif terhadap perilaku pemilih dan hasil pemilihan. Dengan menggunakan teknik seperti pembelajaran mesin dan pembelajaran mendalam, algoritma AI dapat dibor dengan data historis dan menghasilkan model prediktif yang akurat. Penelitian yang dilakukan oleh (Boussalis & Coan, 2016) menunjukkan bahwa model prediksi berbasis AI dapat memprediksi hasil pemilu dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode tradisional.

Namun, penggunaan AI dalam analisis data pemilih juga menghadirkan tantangan dan risiko yang harus diatasi. Salah satu kekhawatiran utama adalah potensi bias algoritma, di mana sistem AI dapat menghasilkan keputusan atau rekomendasi yang bias karena data pelatihan atau asumsi yang mendasarinya. Sebagaimana dijelaskan oleh (Buolamwini & Gebru, 2018), bias algoritma dapat memperkuat ketidakadilan dan diskriminasi dalam konteks komunikasi politik, misalnya dengan menargetkan konten atau pesan tertentu secara tidak proporsional terhadap kelompok tertentu.

Selain itu, penggunaan AI dalam analisis data pemilih juga menghadapi tantangan terkait privasi data dan keamanan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Hitaj et al., 2017), sistem AI yang digunakan untuk menganalisis data pengguna media sosial dapat menyebabkan risiko pelanggaran privasi jika tidak dikelola dengan baik. 4 Oleh karena itu, penting bagi aktor politik dan pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa penggunaan AI dalam analisis data pemilih dilakukan dengan cara yang aman, etis, dan mematuhi peraturan perlindungan data.

Dalam konteks komunikasi politik di era digital, analisis data pemilih dengan AI telah menjadi strategi yang semakin populer. Misalnya, dalam kampanye presiden Amerika Serikat pada tahun 2012 dan 2016, tim menggunakan data kampanye analitik berbasis AI untuk mengidentifikasi kelompok pemilih potensial, menargetkan pesan, dan mengoptimalkan strategi komunikasi mereka.

Namun praktik ini juga mengundang kontroversi dan kritik, terutama terkait skandal Cambridge Analytica pada tahun 2018. Perusahaan tersebut diduga menggunakan data pribadi pengguna media sosial untuk mempengaruhi opini dan perilaku pemilih dalam pemilihan presiden AS 2016.

Untuk memastikan penggunaan AI dalam analisis data pemilih yang bertanggung jawab dan etis, penting bagi para pemangku kepentingan untuk mengembangkan kerangka kerja etika dan tata kelola yang kuat. Hal ini meliputi upaya untuk meningkatkan transparansi izin, memastikan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan berbasis AI, dan melibatkan masyarakat sipil serta akademisi dalam pengembangan dan implementasi sistem AI.

Secara keseluruhan, analisis data pemilih dengan AI merupakan bidang yang terus berkembang dan menawarkan peluang besar untuk memahami perilaku politik dan preferensi pemilih secara lebih mendalam. Namun, penggunaan AI dalam analisis data pemilih juga menghadirkan tantangan signifikan terkait bias algoritma, privasi data, dan potensi yang dicakup. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolektif dari seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa penggunaan AI dalam data pemilu dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab, adil, dan selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi serta tata kelola pemerintahan yang baik.

### **3.3 Implikasi AI terhadap Komunikasi dan Strategi Kampanye**

Perkembangan Kecerdasan Buatan (AI) telah membawa dampak signifikan dalam strategi komunikasi politik dan kampanye pemilu. Dengan kemampuannya menganalisis data besar, mengidentifikasi pola, dan mempersonalisasi konten, AI telah mengubah cara aktor politik terlibat dengan pemilih dan merancang strategi kampanye yang efektif.

Salah satu implikasi utama AI dalam komunikasi politik adalah kemampuannya untuk mempersonalisasi pesan kampanye secara masif. Dengan menggunakan pembelajaran mesin, algoritma, dan analisis data pemilih, aktor politik dapat menyesuaikan konten dan strategi komunikasi mereka dengan preferensi individu atau kelompok pemilih tertentu. Hal ini dapat meningkatkan keterlibatan dan efektivitas kampanye, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian (Kruikemeier et al., 2018) yang menemukan bahwa kampanye pesan yang dipersonalisasi lebih menarik dan menghasilkan tingkat keterlibatan yang lebih tinggi dari pemilih.

Namun, personalisasi konten berbasis AI juga menghadirkan risiko seperti penguatan bias kognitif dan polarisasi politik. Serupa dijelaskan oleh (Tufekci, 2018a), penggunaan AI untuk memproduksi konten personalisasi secara masif dapat memperkuat filter gelembung (filter bubble) dan menciptakan informasi lingkungan yang terfragmentasi, di mana individu hanya terpapar dengan informasi yang sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.

Selain itu, AI juga telah mengubah cara aktor politik mengidentifikasi dan menargetkan calon pemilih. Dengan menggunakan teknik seperti analisis sentimen dan pemodelan prediktif, aktor politik dapat mengidentifikasi kelompok pemilih yang mungkin mendukung atau menentang mereka, serta merancang strategi komunikasi yang tepat untuk memenangkan suara mereka. Namun, praktik ini juga mengundang kekhawatiran tentang privasi data dan potensi manipulasi perilaku pemilih.

Dalam konteks kampanye politik, AI juga telah memfasilitasi penggunaan bot media sosial dan akun palsu untuk menyebarkan informasi atau mempengaruhi diskusi politik secara otomatis. Penelitian yang dilakukan oleh (Ferrara et al., 2016) mengungkapkan bahwa bot media sosial telah digunakan secara luas dalam kampanye politik untuk menyebarkan konten, meningkatkan aktivitas online, dan menciptakan narasi tertentu.

Meskipun bot media sosial dapat digunakan untuk tujuan yang sah, seperti menyebarkan informasi kampanye atau meningkatkan keterlibatan pemilih, penggunaannya juga menimbulkan risiko seperti penyebaran misinformasi dan manipulasi diskusi politik.

Dalam menerapkan AI terhadap komunikasi dan strategi kampanye, penting bagi aktor politik dan pemangku kepentingan untuk mematuhi prinsip-prinsip etika dan transparansi. Hal ini meliputi upaya untuk mengungkapkan secara terbuka penggunaan AI dan algoritma dalam kampanye politik, serta memastikan bahwa praktik seperti personalisasi konten dan penggunaan bot media sosial dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab dan tidak mengarahkan.

Selain itu, perlu adanya kerangka regulasi kerja yang mampu mengatur penggunaan AI dalam komunikasi politik dan kampanye pemilihan umum. Hal ini mencakup aturan tentang privasi data, larangan terhadap praktik manipulatif atau pelayaran, serta mekanisme pengawasan yang efektif.

Di sisi lain, literasi media dan pemahaman tentang AI dalam konteks komunikasi politik juga menjadi sangat penting bagi pemilih dan masyarakat umum. Dengan meningkatkan kesadaran tentang potensi penggunaan AI dalam kampanye politik, pemilih dapat mengembangkan keterampilan kritis dalam menyebarkan informasi dan membuat keputusan yang lebih terinformasi.

Secara keseluruhan, penerapan AI terhadap komunikasi dan strategi kampanye telah mengubah lanskap komunikasi politik secara signifikan. Meskipun AI membawa peluang baru untuk personalisasi konten dan analisis data yang lebih baik, namun juga menghadirkan risiko seperti polarisasi politik, manipulasi perilaku pemilih, dan penyebaran misinformasi. Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan upaya kolektif dari semua pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa penggunaan AI dalam komunikasi politik dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab, adil, dan selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi serta tata kelola pemerintahan yang baik.

## BAB 4

### POLITIK IDENTITAS DAN KOMUNIKASI BERBASIS KELOMPOK



Gambar 4. Ilustrasi Politik Identitas dan Komunikasi Berbasis Kelompok

#### 4.1 Konstruksi Identitas Politik di Ruang Digital

Kemajuan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam cara individu dan kelompok mengonstruksi serta mengekspresikan identitas politik mereka. Ruang digital, dengan berbagai platform media sosial dan komunitas online, telah menjadi panggung baru bagi perjuangan identitas politik yang semakin kompleks dan dinamis. Dalam sub bab ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana identitas politik dikonstruksi di ruang digital, serta implikasi dan tantangan yang muncul dari proses ini.

Salah satu aspek penting dalam konstruksi identitas politik di ruang digital adalah peran media sosial. Seperti yang diungkapkan oleh Dahlgren (Dahlgren, 2018), Media sosial telah menjadi arena penting untuk ekspresi identitas politik, mobilisasi, dan pembentukan opini. Melalui platform seperti Facebook, Twitter, dan Instagram, individu dan kelompok dapat dengan mudah membagikan pandangan politik mereka, membangun narasi identitas, dan menemukan komunitas yang sepemikiran. Namun, proses ini juga rentan terhadap polarisasi dan keberpihakan informasi yang dapat memperkuat identitas politik yang sudah ada.

Di sisi lain, ruang digital juga menawarkan peluang untuk membentuk identitas politik yang lebih dinamis dan hibrid. Seperti yang disampaikan oleh (Brock, 2020), Identitas politik online tidak hanya terbatas pada kategori tradisional seperti ras, etnis, atau afiliasi partai, tetapi juga dapat mencakup minat, gaya hidup, dan isu-isu spesifik. Individu dapat mengeksplorasi dan menegosiasikan identitas politik mereka dengan cara yang lebih fleksibel, melampaui batasan geografis dan budaya.

Salah satu fenomena menarik dalam konstruksi identitas politik di ruang digital adalah munculnya komunitas virtual atau "cyberbalkanisasi" (Sunstein, 2017). Individu cenderung bergabung dengan kelompok-kelompok online yang memiliki pandangan politik serupa, menciptakan ruang eksklusif yang dapat memperkuat identitas politik tertentu dan meminimalkan eksposur terhadap sudut pandang yang berbeda. Ini dapat memperdalam polarisasi dan mempersulit dialog lintas identitas.

Namun, kita juga tidak dapat mengabaikan potensi transformatif dari ruang digital dalam mempromosikan solidaritas dan pemberdayaan identitas politik yang termarginalkan. Menurut (Appadurai, 1996), "Komunitas diaspora dan kelompok minoritas dapat menggunakan ruang digital untuk membangun solidaritas global, mempertahankan identitas budaya, dan memperjuangkan agenda politik mereka. Contohnya, gerakan aktivis seperti Black Lives Matter dan #MeToo telah memanfaatkan kekuatan media sosial untuk memperkuat identitas politik mereka, memobilisasi dukungan, dan menyebarkan pesan mereka secara global.

Dalam konteks konstruksi identitas politik di ruang digital, kita juga perlu memperhitungkan peran algoritme dan kecerdasan buatan (AI). Algoritme media sosial memainkan peran penting dalam menyaring dan menyajikan konten yang relevan dengan identitas dan preferensi politik pengguna. Namun, hal ini juga dapat menciptakan filter gelembung dan memperkuat prasangka kognitif yang sudah ada (Pariser, 2011c). Di masa depan, kecerdasan buatan mungkin juga akan mempengaruhi cara identitas politik dikonstruksi dan dikomunikasikan di ruang digital.

Pada akhirnya, konstruksi identitas politik di ruang digital adalah proses yang kompleks dan multidimensi. Ia menawarkan peluang untuk eksplorasi identitas yang lebih dinamis dan inklusif, namun juga menghadirkan tantangan seperti polarisasi,